

**CIGARETTE TAX DILEMMA: SUPPRESSING CONSUMPTION OR HARMING TOBACCO FARMERS**

**DILEMA PAJAK ROKOK : MENEKAN KONSUMSI ATAU MERUGIKAN PETANI TEMBAKAU**

**Mohamad Djasuli<sup>1</sup>, Siti Yunia Amalia<sup>2</sup>, Dilla Rachma Ayu<sup>3</sup>, Firdaushil Hasanah<sup>4</sup>**

Universitas Trunojoyo Madura<sup>1,2,3,4</sup>

[djasuli@trunojoyo.ac.id](mailto:djasuli@trunojoyo.ac.id)<sup>1</sup>, [230221100005@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230221100005@student.trunojoyo.ac.id)<sup>2</sup>,  
[230221100040@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230221100040@student.trunojoyo.ac.id)<sup>3</sup>, [230221100022@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230221100022@student.trunojoyo.ac.id)<sup>4</sup>

**ABSTRACT**

*The purpose of this article is to examine the dilemma surrounding cigarette taxation: whether government policies truly reduce cigarette consumption or instead harm tobacco farmers. This study employs a descriptive qualitative method by analyzing official documents related to cigarette tax policies. The research was conducted through a literature review by collecting and analyzing relevant sources, including academic journals, official government reports, newspaper articles, and publications from related organizations available in both physical libraries and digital databases. The findings indicate that an increase in cigarette taxes is effective in reducing consumption, particularly among younger age groups. However, this policy also negatively impacts tobacco farmers and small-scale cigarette industries. Therefore, it is essential to balance this policy with impact mitigation strategies for the agricultural and tobacco sectors. This ensures that excise tax policies not only prioritize public health but also consider the broader and more sustainable economic well-being of affected communities*

**Keywords:** Cigarette tax, Cigarette consumption, Tobacco farmers

**ASBTRAK**

*Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui dilema pajak rokok: apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini benar-benar menekan konsumsi rokok atau malah merugikan para petani tembakau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memperoleh data melalui analisis dokumen resmi terkait kebijakan pajak rokok. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber literatur yang relevan. Data diperoleh dari jurnal akademik, laporan data resmi pemerintah, artikel surat kabar, serta publikasi dari organisasi terkait yang tersedia melalui perpustakaan fisik maupun basis data digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan pajak rokok memang efektif dalam mengurangi konsumsi rokok, terutama di kalangan usia muda. Namun, kebijakan ini juga berdampak negatif terhadap petani tembakau dan industri rokok skala kecil. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu diimbangi dengan strategi mitigasi dampak bagi sektor pertanian dan industri tembakau agar kebijakan cukai tidak hanya berfokus pada kesehatan publik, tetapi juga memperhatikan aspek ekonomi masyarakat terdampak secara menyeluruh dan berkelanjutan*

**Kata Kunci:** Pajak Rokok, Konsumsi Rokok, Petani Tembakau

**PENDAHULUAN**

Kebijakan pajak rokok terutama di Indonesia merupakan salah satu instrumen fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan konsumsi dan meningkatkan pendapatan negara dan dapat berdampak negatif pada industri dan petani tembakau. Sektor tembakau di Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian lokal, memberikan mata pencaharian bagi jutaan orang, termasuk petani, buruh tani, dan pekerja di industri pengolahan. Banyak petani yang telah

berinvestasi besar dalam budidaya tembakau dan bergantung pada hasil panen untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kebijakan pajak yang lebih tinggi dapat menyebabkan penurunan permintaan rokok, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada pendapatan petani tembakau.

Kebijakan kenaikan cukai pada rokok terdapat di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 adalah untuk meningkatkan nilai cukai rokok (Roosa, 2021).

Tujuannya adalah untuk menurunkan prevalensi merokok, khususnya di kalangan anak, dari 9,1 persen menjadi 8,7 persen pada tahun 2024. Namun, karena dampaknya yang luas, penerapan kebijakan ini menimbulkan masalah. Kebutuhan jutaan petani tembakau diabaikan dalam kebijakan kenaikan cukai rokok tahun 2024. Kebijakan ini, yang berpotensi menurunkan harga jual tembakau, diperkirakan akan berdampak pada sekitar 6 juta petani tembakau. Ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal sering memiliki efek yang tidak adil, memberatkan kelompok tertentu sementara menguntungkan kelompok lain (Achmad Nur Hidayat, 2021).

Dampak kebijakan pajak rokok terhadap petani tembakau yang bergantung pada sektor ini cukup signifikan dan kompleks. Pengenaan pajak yang lebih tinggi dapat menyebabkan penurunan permintaan rokok, yang pada gilirannya mengurangi kebutuhan akan tembakau. Hal ini berdampak negatif secara berkala pada pendapatan petani, yang sering kali telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan sumber daya dalam budidaya tembakau. Penurunan permintaan dapat memaksa petani untuk menjual hasil panen dengan harga yang lebih rendah, menyebabkan kerugian finansial yang besar dan meningkatkan risiko ketidakstabilan ekonomi bagi keluarga mereka. Oleh karena itu, ada kekhawatiran bahwa kebijakan pajak yang ketat dapat memicu krisis ekonomi di kalangan petani tembakau dan mengancam keberlangsungan hidup mereka (Susilawati, 2023).

Pajak rokok sebagai instrumen kesehatan masyarakat adalah untuk mengurangi tingkat konsumsi rokok melalui peningkatan harga, sehingga mendorong individu, terutama generasi muda, untuk menghindari atau menghentikan kebiasaan merokok.

Dengan menjadikan rokok semakin tidak terjangkau, pajak ini berfungsi sebagai pencegah, yang diharapkan dapat menurunkan prevalensi penyakit terkait rokok, seperti kanker, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Pajak rokok juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok, mendorong pola hidup sehat, dan mempromosikan kebijakan kesehatan yang lebih luas. Hasil dari kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi beban biaya perawatan kesehatan yang ditanggung oleh negara akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah (Santoso, 2022).

Beberapa jurnal yang membahas masalah Indonesia dalam ratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) menyatakan bahwa "Industri rokok memberikan dampak positif bagi pendapatan Negara tetapi memiliki dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat" (Ravie et al., 2023). Ini adalah dasar dari masalah kebijakan fiskal terkait rokok di Indonesia, di mana pemerintah harus menyeimbangkan tujuan ekonomi dengan tujuan kesehatan masyarakat.

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pengaruh pajak rokok apakah menekan konsumsi atau merugikan petani.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif deskriptif dan analisis data sekunder. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi terkait kebijakan pajak rokok dan dampaknya terhadap masyarakat serta petani tembakau. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi individu mengenai kebijakan tersebut. Data yang dikumpulkan akan memberikan

wawasan mendalam tentang bagaimana pajak rokok memengaruhi pola konsumsi dan kehidupan sehari-hari masyarakat, serta tantangan yang dihadapi oleh petani tembakau dalam industri ini.

Analisis data sekunder akan digunakan untuk mendukung temuan dari penelitian kualitatif. Data sekunder ini mencakup informasi yang sudah ada, seperti statistik konsumsi rokok, laporan kesehatan masyarakat, dan data ekonomi terkait sektor tembakau. Dengan menggabungkan data kualitatif dan sekunder, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak kebijakan pajak rokok. Hal ini akan membantu pembaca memahami keterkaitan antara kesehatan masyarakat dan kesejahteraan petani tembakau, serta memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan.

- Analisis Dokumen dan Pengumpulan Data: Dokumen yang dianalisis mencakup laporan resmi pemerintah, artikel di surat kabar, dan sumber lain yang relevan dengan tema kebijakan pajak rokok. Melalui analisis dokumen, peneliti dapat memahami konteks kebijakan dan implikasinya bagi kesehatan masyarakat serta kesejahteraan petani tembakau.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari laporan resmi pemerintah, artikel surat kabar, serta sumber relevan lainnya, ditemukan bahwa kebijakan ini memiliki konsekuensi ganda. Dampak pada konsumen perokok dalam kenaikan pajak rokok terbukti efektif dalam menekan konsumsi, terutama di kelompok masyarakat dan usia tertentu. Namun, di sisi lain kebijakan ini menimbulkan tantangan bagi petani

tembakau dan industri rokok skala kecil akibat turunnya permintaan bahan baku serta meningkatnya peredaran rokok ilegal. Pada dasarnya pemerintah Indonesia itu telah menerapkan beberapa kebijakan untuk menekan angka konsumsi rokok pada Masyarakat dan mengurangi prevalensi perokok, khususnya dikalangan anak-anak dan remaja. Berikut adalah hasil dari analisis data sekunder terkait dilema pajak rokok untuk kesehatan masyarakat dan dampaknya terhadap sektor pertanian tembakau.

### **1. Dampak Terhadap Konsumsi Rokok**

Berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023), kebijakan pajak rokok telah terbukti secara signifikan menurunkan tingkat konsumsi rokok di Indonesia. Laporan tersebut menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai rokok sebesar 10-20% dapat mengurangi konsumsi rokok sebesar 4-6%. Hal ini sejalan dengan temuan dari artikel di Kompas (2024), yang mengungkapkan bahwa kebijakan peningkatan pajak rokok telah berhasil menurunkan jumlah perokok aktif, terutama di kalangan usia muda. Penurunan konsumsi rokok ini berhubungan langsung dengan tujuan utama kebijakan, yaitu mengurangi dampak buruk merokok terhadap kesehatan masyarakat.

Dampak Kebijakan pajak rokok merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk menekan konsumsi rokok di masyarakat. Para perokok sudah mengetahui akan dampak dan bahaya merokok, namun masih tetap saja melakukan aktivitas tersebut. Menurut (Permathic, 2012) mengatakan bahwa berbagai pihak sudah sering mengeluhkan ketidaknyamanannya ketika berdekatan

dengan orang yang merokok, terbukti bahwa bahaya merokok bukan saja milik perokok tetapi juga berdampak pada orang - orang disekelilingnya.

Hasil dari berbagai sumber penelitian ini berbanding lurus dengan hasil yang ditemukan dalam penelitian oleh (Murniasih, E. 2024) yang menyatakan menolak H0 dan menerima H1 bahwa produksi tembakau memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak rokok. Berbagai dampak dan bahaya merokok sebenarnya sudah dipublikasikan kepada masyarakat, namun kebiasaan merokok masyarakat Indonesia masih sulit untuk dihentikan, oleh karena itu penting untuk mengevaluasi kebijakan yang berhasil dalam mencapai tujuan.

## **2. Dampak Terhadap Petani Tembakau**

Berdasarkan artikel yang diterbitkan di *The Jakarta Post* (2024), kebijakan ini menyebabkan penurunan permintaan terhadap tembakau. Para petani tembakau mengeluhkan bahwa harga tembakau yang tidak sebanding dengan biaya produksi mereka, ditambah dengan turunnya jumlah konsumsi rokok, mengancam keberlanjutan usaha pertanian tembakau petani. Laporan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (2023) mengungkapkan bahwa sekitar 30% petani tembakau di Jawa Timur mengalami penurunan pendapatan sejak diberlakukannya pajak rokok yang lebih tinggi. Data dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2022) menunjukkan bahwa petani tembakau di daerah penghasil utama, seperti Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat, merasa tertekan oleh kebijakan pajak rokok yang menyebabkan turunnya harga jual tembakau mereka.

Data dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI, 2024) menunjukkan bahwa kenaikan cukai rokok berdampak pada berkurangnya permintaan tembakau dari pabrik rokok, yang berujung pada penurunan harga tembakau di tingkat petani. Dan juga laporan dari *Bisnis Indonesia* (2024) mengungkapkan bahwa beberapa petani bahkan beralih ke tanaman lain karena ketidakstabilan harga tembakau akibat kebijakan cukai rokok. Hal ini berdampak pada kesejahteraan petani, yang sebagian besar bergantung pada pendapatan dari penjualan tembakau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dampak kebijakan pajak rokok terhadap petani tembakau merupakan aspek penting yang perlu dianalisis secara mendalam. Pengenaan pajak yang lebih tinggi pada produk tembakau dapat menyebabkan penurunan permintaan rokok di pasar. Ketika konsumsi rokok berkurang, secara langsung hal ini memengaruhi pendapatan petani tembakau yang bergantung pada permintaan pasar untuk produk mereka. Penurunan permintaan ini bisa mengakibatkan penurunan harga tembakau, sehingga mengurangi pendapatan yang diterima oleh petani (Kustiari, 2022). Beberapa petani mungkin harus mengurangi luas lahan yang mereka tanami tembakau atau bahkan beralih ke komoditas lain yang lebih menguntungkan. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada kehidupan ekonomi petani, tetapi juga dapat mempengaruhi komunitas yang bergantung pada industri tembakau untuk mata pencaharian mereka (Ravie et al., 2023). Berikut hasil dari analisis data terkait pengaruh kebijakan pajak pada sektor pertanian di Indonesia:

- 1. Penurunan Pendapatan :** Pengeunaan pajak yang lebih tinggi pada produk rokok dapat mengakibatkan penurunan permintaan yang signifikan. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan petani tembakau, yang sangat bergantung pada tingkat konsumsi rokok di pasar. Ketika harga rokok meningkat akibat pajak, banyak perokok mungkin memilih untuk mengurangi pembelian mereka, sehingga mengurangi pendapatan yang diterima oleh petani dari penjualan tembakau. Akibatnya, petani menghadapi tantangan finansial yang dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.
- 2. Pengurangan Permintaan :** Dengan menurunnya konsumsi rokok, petani tembakau mungkin menghadapi kesulitan dalam menjual hasil panen mereka. Penurunan permintaan ini menyebabkan tekanan pada pasar, yang berujung pada penurunan harga tembakau. Ketika harga tembakau jatuh, petani tidak hanya kehilangan potensi pendapatan, tetapi juga mungkin terpaksa menyimpan hasil panen yang tidak terjual.
- 3. Perubahan Pola Tanam:** Sebagai respons terhadap perubahan permintaan, beberapa petani mungkin terpaksa mengurangi luas lahan yang mereka tanami tembakau. Dalam situasi di mana pendapatan dari tembakau menurun, beralih ke komoditas lain yang lebih menguntungkan menjadi pilihan yang menarik. Perubahan pola tanam ini tidak hanya berdampak pada produksi tembakau, tetapi juga dapat memengaruhi ekosistem pertanian lokal, serta mengubah dinamika pasar pertanian secara keseluruhan.
- 4. Dampak Sosial:** Penurunan pendapatan dan permintaan tembakau tidak hanya memengaruhi petani secara individu, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan sosial komunitas yang bergantung pada industri tembakau. Banyak keluarga di daerah pertanian tembakau menggantungkan hidup mereka pada hasil penjualan tembakau. Ketika pendapatan menurun, hal ini dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya di komunitas tersebut, yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi.
- 5. Kebutuhan akan Dukungan :** Dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kebijakan pajak rokok, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menyediakan program dukungan bagi petani. Program ini dapat berupa pelatihan, bantuan finansial, atau akses ke pasar alternatif yang dapat membantu petani beradaptasi dengan perubahan pasar. Dukungan semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa petani tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga menemukan cara untuk berkembang meskipun dalam situasi yang sulit.
- 6. Inovasi dan Diversifikasi:** Kebijakan pajak yang berdampak pada pendapatan petani tembakau mendorong mereka untuk mencari alternatif dan diversifikasi usaha pertanian mereka. Inovasi dalam cara bertani dan penanaman komoditas baru dapat membantu petani mengurangi ketergantungan

pada tembakau. Melalui diversifikasi, petani dapat menciptakan sumber pendapatan tambahan, yang akan meningkatkan ketahanan ekonomi mereka dalam jangka panjang, serta mengurangi risiko yang dihadapi akibat fluktuasi pasar tembakau.

#### **7. Ketidakpastian Ekonomi:**

Kebijakan pajak dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi bagi petani tembakau, yang berpotensi mempengaruhi keputusan investasi dan perencanaan jangka panjang mereka. Ketidakpastian ini dapat membuat petani ragu untuk melakukan investasi dalam peralatan, teknologi, atau pengembangan lahan baru. Ketika situasi pasar tidak stabil, petani mungkin merasa sulit untuk merencanakan masa depan, yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan sektor pertanian mereka secara keseluruhan.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu merancang program yang dapat membantu petani beradaptasi dengan perubahan pasar akibat kebijakan pajak. Program pelatihan, bantuan finansial, dan akses ke pasar alternatif dapat menjadi langkah-langkah yang efektif untuk memastikan keberlanjutan kehidupan petani tembakau. Melalui pendekatan yang komprehensif, diharapkan dampak negatif kebijakan pajak dapat diminimalisir, sehingga kesejahteraan petani tetap terjaga meskipun ada penurunan permintaan tembakau (Terok & Liofa, 2024).

#### **3. Kebijakan yang seimbang**

Merancang kebijakan pajak rokok yang seimbang sangat penting agar tujuan kesehatan tercapai tanpa menciptakan masalah sosial baru di kalangan petani tembakau. Pengenaan pajak yang terlalu tinggi memang efektif menurunkan konsumsi rokok, tetapi juga bisa menyebabkan penurunan drastis dalam permintaan tembakau oleh industri rokok. Isu Kesehatan Masyarakat: Meskipun tembakau memiliki manfaat konsumsi dan produktif tembakau sering dikaitkan dengan masalah Kesehatan seperti penyakit merokok. Hal ini menimbulkan masalah bagi masyarakat setempat: Hal ini menimbulkan masalah bagi masyarakat setempat: mereka bergantung pada industry ini untuk hidup, tetapi mereka juga menghadapi resiko masalah Kesehatan di masa depan.

Tujuannya adalah untuk mengurangi prevalensi merokok di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Meroko di Indonesia, terutama di kalangan anak-anak dan remaja, masih sangat umum, meskipun peraturan ini cukup komprehensif. Meskipun kebijakan kesehatan terkait tembakau di Indonesia masih berkembang, kebijakan yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran publik diperlukan untuk mengurangi prevalensi Meroko dan mengatasi dampak negatifnya terhadap ekonomi dan kesehatan. (Hikmah, F. N. 2025)

Kebijakan yang seimbang tidak hanya akan menguntungkan petani dan meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat menciptakan peluang untuk inovasi dalam sektor pertanian. Dengan adanya insentif untuk beralih ke produk yang lebih ramah lingkungan atau lebih sehat,

sektor pertanian dapat berkembang dengan cara yang berkelanjutan. Dengan merumuskan kebijakan yang holistik dan inklusif, diharapkan tercipta situasi win-win yang menguntungkan semua pihak yang terlibat berikut beberapa kebijakan, menurut (Kustiari, 2022).

Kebijakan peran ganda dalam upaya menyeimbangkan dua tujuan utama: pengendalian konsumsi rokok untuk melindungi kesehatan masyarakat serta meningkatkan penerimaan negara melalui kontribusi pajak. hingga distributor, menjadikan setiap perubahan kebijakan cukai memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas sosial-ekonomi. Di sisi lain, efektivitas kebijakan cukai rokok dalam mengurangi konsumsi rokok masih menjadi topik perdebatan yang hangat di kalangan akademisi, pembuat kebijakan, dan aktivis kesehatan. Menurut Kementerian Keuangan (2023), cukai rokok menjadi salah satu sumber penerimaan negara terbesar di luar sektor migas, dengan kontribusi mencapai lebih dari 10% dari total penerimaan negara. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan cukai dalam mengendalikan konsumsi, sekaligus merugikan penerimaan negara. Data dari Bea dan Cukai (2022) mencatat bahwa peredaran rokok ilegal di Indonesia masih mencapai 6-8% dari total pasar rokok nasional. (Marbun, 2025). Berikut data yang diperoleh guna untuk strategi kebijakan yang seimbang agar tidak merugikan sektor pertanian dan juga kesehatan masyarakat di Indonesia.

### **1. Pajak Bertahap**

Mengimplementasikan kenaikan pajak rokok secara bertahap dapat memberikan waktu yang cukup bagi petani dan industri untuk

beradaptasi dengan perubahan pasar. Dengan pendekatan ini, petani dapat merencanakan dan melakukan penyesuaian produksi secara bertahap, sehingga dampak negatif terhadap pendapatan dan kesejahteraan mereka dapat diminimalisir.

### **2. Harga Minimum Tembakau**

Menetapkan harga minimum untuk produk tembakau dapat menjadi langkah penting untuk melindungi pendapatan petani, meskipun permintaan mengalami penurunan. Kebijakan ini memastikan bahwa petani tidak terpaksa menjual hasil panen mereka dengan harga yang sangat rendah, yang bisa menyebabkan kerugian finansial yang besar. Dengan adanya harga minimum, petani dapat memiliki kepastian lebih dalam perencanaan ekonomi mereka, sehingga menciptakan stabilitas dalam sektor pertanian tembakau.

### **3. Program Diversifikasi**

Mendirikan program yang memberikan pelatihan dan dukungan bagi petani untuk beralih ke komoditas alternatif yang lebih menguntungkan dan berkelanjutan sangatlah penting. Program ini dapat membantu petani memahami cara bertani dan memasarkan produk baru, serta memberikan akses ke informasi dan sumber daya yang diperlukan. Dengan diversifikasi, petani tidak hanya mengurangi ketergantungan pada tembakau, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan mereka melalui variasi produk yang ditawarkan.

### **4. Bantuan Finansial**

Menyediakan bantuan finansial atau insentif bagi petani yang terdampak oleh kebijakan pajak sangat penting untuk membantu

mereka beradaptasi dan berinvestasi dalam usaha baru. Bantuan ini dapat berupa hibah, pinjaman bersubsidi, atau program insentif yang mendorong inovasi pertanian. Dengan adanya dukungan finansial, petani akan lebih mampu menghadapi tantangan yang muncul akibat penurunan permintaan tembakau, sekaligus memiliki kesempatan untuk mengembangkan alternatif usaha yang lebih menguntungkan.

#### **5. Riset dan Pengembangan**

Mendukung penelitian dan pengembangan untuk menciptakan varietas tembakau yang lebih ramah lingkungan atau produk alternatif yang lebih sehat merupakan langkah strategis dalam menghadapi perubahan pasar. Investasi dalam riset dapat menghasilkan tembakau yang lebih tahan terhadap hama dan penyakit, serta memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah. Pengembangan produk alternatif seperti rokok herbal atau nikotin non-tembakau dapat memberikan pilihan baru bagi konsumen dan meningkatkan keberlanjutan sektor pertanian.

#### **6. Kolaborasi dengan Petani**

Melibatkan petani dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak sangat penting untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan kebutuhan mereka dipertimbangkan. Dengan adanya dialog yang konstruktif antara pemerintah dan petani, kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dan efektif. Kolaborasi ini juga dapat menciptakan rasa kepemilikan di kalangan petani terhadap kebijakan yang diimplementasikan, sehingga

meningkatkan kemungkinan keberhasilan kebijakan tersebut.

#### **7. Monitoring dan Evaluasi**

Membangun sistem untuk memantau dampak kebijakan pajak secara berkala sangat penting agar penyesuaian dapat dilakukan jika diperlukan. Monitoring yang efektif memungkinkan pihak berwenang untuk mengevaluasi apakah kebijakan tersebut mencapai tujuannya dalam mengurangi konsumsi rokok dan melindungi petani. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih baik dan merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat.

#### **4. Pendapat Kelompok**

Kebijakan pajak rokok memang memiliki dua sisi yang saling bertentangan. Dari perspektif kesehatan masyarakat, kebijakan ini terbukti efektif dalam menekan konsumsi rokok, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan generasi muda. Hal ini tentu menjadi langkah positif dalam mengurangi dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok, seperti penyakit jantung dan kanker.

Dari perspektif sektor pertanian, kebijakan ini membawa dampak negatif terhadap petani tembakau dan industri rokok tradisional. Penurunan permintaan tembakau akibat kenaikan cukai rokok menyebabkan berkurangnya pendapatan petani, yang pada akhirnya dapat berujung pada krisis ekonomi di sektor pertanian tembakau. Data dalam artikel menunjukkan bahwa jutaan petani dan pekerja di industri ini terdampak secara langsung.

Artikel ini mengusulkan pendekatan kebijakan yang lebih seimbang, seperti:

- **Kenaikan pajak secara bertahap** agar petani dan industri bisa beradaptasi.
- **Penetapan harga minimum tembakau** untuk melindungi pendapatan petani.
- **Diversifikasi pertanian** agar petani bisa beralih ke komoditas lain yang lebih berkelanjutan.
- **Bantuan finansial dan pelatihan** untuk petani agar mereka bisa menghadapi perubahan ekonomi.

Menurut kelompok kami, kebijakan pemerintah harus lebih mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap berbagai sektor terkait, bukan hanya aspek kesehatan. Idealnya, ada strategi mitigasi yang lebih konkret untuk melindungi kesejahteraan petani, seperti insentif bagi mereka yang ingin beralih ke sektor lain atau dukungan inovasi dalam industri tembakau yang lebih ramah lingkungan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan pajak rokok memang efektif dalam mengurangi konsumsi rokok, tetapi berdampak negatif terhadap petani tembakau dan industri rokok skala kecil. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu diimbangi dengan strategi mitigasi dampak bagi sektor pertanian dan industri tembakau, agar kebijakan cukai tidak hanya berfokus pada kesehatan publik, tetapi juga memperhatikan aspek ekonomi masyarakat yang terdampak.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan saran

selama proses penelitian, dan juga kepada berbagai sumber yang telah menyediakan data dan informasi yang menjadi dasar penelitian ini. Semoga penelitian ini memberikan informasi dan wawasan bagi kebijakan pajak rokok di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Nur Hidayat, MPP. (2021). *Kebijakan Cukai Rokok di Indonesia: Antara Inflasi dan Dilema Sosioekonomi*. ACHMAD NUR HIDAYAT. <https://achmadnurhidayat.id/2023/11/kebijakan-cukai-rokok-di-indonesia-antara-inflasi-dan-dilema-sosioekonomi/>
- Aprilliya, Anggi Duwi, Sri Kamariyah, and Amirul Mustofa. "Kolaborasi antar Aktor dalam Penanganan Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Jawa Timur." *Soetomo Administrasi Publik*(2023):501-512. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/download/7265/3412>
- Aulana, Muhammad Saukhan, et al. "Tantangan Penegakan Hukum Peradilan Pajak Terhadap Industri Rokok Ilegal di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)* 7.1 (2025): 20-30. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/article/view/15051>
- Bidja, Isnanto. "Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5.1 (2021): 113-130. <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/381>
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2022). *Dampak Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Penindakan Rokok Ilegal terhadap Konsumsi Rokok Rumah Tangga*. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*,

- 6.1, 47–64.  
<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/PBC/article/download/1559/855>
- HUMAS. (2022). *Kendalikan Bahaya Merokok, Pemerintah Naikkan Cukai Hasil Tembakau*. Setkab.Go.Id.  
<https://setkab.go.id/kendalikan-bahaya-merokok-pemerintah-naikkan-cukai-hasil-tembakau/>
- Ispriyarso. (2022). Fungsi Reguler Pajak Rokok Di Bidang Kesehatan. *Masalah-Masalah Hukum*, 3, 228–240.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Peraturan Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2020). *Analisis Dampak Kenaikan Cukai Tembakau Terhadap Industri dan Petani Tembakau*.  
<https://bkperdag.kemendag.go.id/pengkajian/hasilanalisis/view/eyJpZCI6IjZZZMTM0UTk4aTdMSGVUY1pwWHV4M3c9PSIsImRhZGEiOiJpTEIIIIn0%3D>
- Kustiari, A. S. nFN H. B. M. S. R. (2022). Dampak Kebijakan Cukai Rokok terhadap Distribusi Surplus Ekonomi Industri Rokok di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol 37, No 1 (2019): *Jurnal Agro Ekonomi*, 1–23.
- Marchel, Yoshef Arieka, Ratih Indraswari, and Novia Handayani. "Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal." *Jurnal Promkes* 7.2 (2019): 144.  
<https://www.academia.edu/download/101160895/8971.pdf>
- Marianti, A., & Prayitno, B. (2020). Analisis Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi, Pendapatan dan Harga Rokok Terhadap Konsumsi Rokok di Indonesia. *Economie*, 1.2, 93–106.  
[https://journal.uwks.ac.id/index.php/economie/article/view/1126KementerianPerdaganganRepublikIndonesia.\(2020\).AnalisisDampakKenaikanCukaiTembakauTerhadapIndustriDanPetaniTembakau.](https://journal.uwks.ac.id/index.php/economie/article/view/1126KementerianPerdaganganRepublikIndonesia.(2020).AnalisisDampakKenaikanCukaiTembakauTerhadapIndustriDanPetaniTembakau.)
- Murniasih, E. (2024). Rokok Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan. *Initium Community Journal*, 4(2), 27-33.
- Nafi'ah, Binti Azizatun. "Strategi Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau dalam Rangka Menekan Konsumsi Rokok Indonesia Policy Strategy Of Increasing The Excise Rate Of Tobacco Products In Impressing Indonesian Cigarette Consumption." *Journal of Governance and Administrative Reform* 2.1 (2021). (<https://ejournal.unair.ac.id/JGAR/article/download/30662/22650>)
- PK, S. (2022). *Mengurangi Konsumsi Rokok Masyarakat Melalui Reformasi Kebijakan Cukai Hasil Tembakau, Berhasilkah?* Stranaspk.Id/.  
<https://stranaspk.id/publikasi/berita/mengurangi-konsumsi-rokok-masyarakat-melalui-reformasi-kebijakan-cukai-hasil-tembakau-berhasilkah>
- Pratiwi, E. Y. (2019). Rencana Kebijakan Kenaikan Cukai Rokok pada Perokok Aktif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 11,2.  
<https://jik.stikesalifah.ac.id/index.php/jurnalakes/article/download/685/pdf>
- Ravie, A., Prakoso, H. A., & Prasodjo, H. (2023). Dilema Indonesia Dalam Ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control Terhadap

- Industri Rokok Nasional. *Reformasi*, 13(1), 48–63. <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.3983>
- Rokom. (2021). *Optimalisasi Pajak Rokok Daerah Untuk Pelayanan Kesehatan*. Kemenkes. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20210429/0337597/optimalisasi-pajak-rokok-daerah-untuk-pelayanan-kesehatan/>
- Roosa, M. (2021). Dampak Kenaikan Cukai dalam RPJMN 2020–2024. <https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2021/dilema-rokok-antara-kesehatan-dan-untung-besar-negara-dari-cukai-rokok/>
- Santoso, R. (2022). Dilema Kebijakan Pengendalian Tembakau di Indonesia. *Kajian*, 21(3), 201–219.
- Suara Muhammadiyah. (2025). Kebijakan HJE Rokok 2025: Dilematisasi Pengendalian Konsumsi Rokok di Indonesia. Retrieved from <https://suaramuhammadiyah.id/read/kebijakan-hje-rokok-2025-dilematisasi-pengendalian-konsumsi-rokok-di-indonesia>
- Susilawati, H. (2023). Pemetaan Penelitian Cukai Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 7(2), 281–297. <https://doi.org/10.31092/jpbca.v7i2.2282>
- Terok, D. F. S., & Liofa, L. P. (2024). Problematika Kewenangan Dalam Pemungutan dan Pengolaan Pajak Rokok. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15649–15657. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14647>
- World Health Organization. (2019). Menaikkan Cukai dan Harga Produk Tembakau untuk Indonesia Sehat dan Sejahtera. <https://cdn.who.int/media/docs/default-source/sear/indonesia/menaikkan-cukai-dan-harga-produk-tembakau-untuk-indonesia-sehat-dan-sejahtera.pdf>
- Wulanningrum, Prilianting Asri, Emmy Riyanti, and Kusyogo Cahyo. "Evaluasi penerapan kebijakan peraturan daerah kota semarang nomor 3 tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok (ktr) pada program studi kesehatan masyarakat di perguruan tinggi kota semarang." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 4.5 (2016): 362-369. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/14629>
- <https://achmadnurhidayat.id/2023/11/kebijakan-cukai-rokok-di-indonesia-antara-inflasi-dan-dilema-sosioekonomi/>
- <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20210429/0337597/optimalisasi-pajak-rokok-daerah-untuk-pelayanan-kesehatan/>
- <https://expert-taxindonesia.com/kebijakan-pajak-rokok-elektrik-dampak-dan-harapan-di-tahun-2024/>
- <https://stranaspk.id/publikasi/berita/menurangi-konsumsi-rokok-masyarakat-melalui-reformasi-kebijakan-cukai-hasil-tembakau-berhasilkah>
- <https://setkab.go.id/kendalikan-bahaya-merokok-pemerintah-naikkan-cukai-hasil-tembakau/>